

COMMUNITY EMPOWERMENT IMPLEMENTATION THROUGH TRAINING TRAINING

Imelda Napa Raja

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political

Sciences Tribhuwana Tunggal University

Email: imeldhaleona48@gmail.com

Abstract: *Implementation of Batik Training is one way to empower the community in Bunut Wetan Village. This Research Aims To Describe: 1) Implementation of Community Empowerment Through the Batik Training Program. 2) Factors that support and inhibit anything in the process of implementing the Community Empowerment Program Through the Batik Training Program in Bunut Wetan Village, Malang Regency. The type of research used is qualitative. Data sources: primary data and secondary data. The technique of determining the informant was purposive sampling, with village head informants, KAUR Village Government, PKK Chairmen and village communities who took part in the batik training. Then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion. After that the data was tested using triangulation techniques, namely interviews, observation and documentation. The results of the study that the implementation of batik training in empowering the community was good. Implementation of Batik Training from village government policies has tried and provided the community with the opportunity to participate in the training. In its implementation there are several obstacles such as the absence of a definite container for batik training and funds that have not been provided.*

Keywords: *Implementation, Community Empowerment, Batik Training.*

Abstrak: Pelaksanaan Pelatihan Membatik merupakan salah satu cara memberdayakan masyarakat di Desa Bunut Wetan. Penelitian Ini Bertujuan untuk Mendeskripsikan: 1) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Membatik. 2) Faktor-faktor yang pendukung dan menghambat apa saja dalam Proses implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Membatik di Desa Bunut Wetan Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sumber data: data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan *purposive Sampling*, dengan informan Kepala Desa, KAUR Pemerintah Desa, Ketua PKK dan Masyarakat desa yang mengikuti pelatihan membatik melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah itu diuji menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pelatihan membatik dalam memberdayakan masyarakat sudah baik. Pelaksanaan pelatihan membatik dari kebijakan pemerintah sudah berusaha serta memberikan masyarakat kesempatan untuk ikut serta dalam pelatihan tersebut. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala seperti belum adanya wadah yang pasti untuk pelatihan membatik serta data yang belum cukup tersediakan.

Kata kunci: Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan Membatik.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Indonesia menjadi salah satu dari sekian banyak negara berkembang. Salah satu permasalahan yang terdapat pada setiap negara berkembang adalah kemiskinan dan pengangguran. Dengan adanya kemiskinan maka akan mempengaruhi tujuan dan cita-cita negara yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Dimas, dkk, 2012: 2).

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (*growth strategy*) terbukti mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi secara global, walaupun diisilain ternyata justru memperlebar adanya ketimpangan dan kemiskinan dikalangan masyarakat. Mekanisme "*trickle down effect*" yang

dijanjikan dampak pertumbuhan ekonomi tidak terbukti. Dengan demikian di balik pertumbuhan ekonomi secara nasional terdapat kesenjangan yang semakin tajam baik antar lapisan masyarakat, antar daerah maupun antar desa dengan kota. Akibatnya, pembangunan yang diharapkan akan dapat memakmurkan dan mensejahterakan, malah identik dengan penggusuran dengan pengeliminasian terhadap sebagian anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pembangunan tersebut (Soetomo, 2011:67).

Pemerintah berupaya dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan membuka lapangan kerja dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dipedesaan. Menurut Usman, (2010:5), peran pemerintah dalam kegiatan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan. Seberapa jauh pemerintah melakukan fungsi-fungsi yang memacu dan meluruskan perjalanan pembangunan masyarakat. Prioritas pembangunan adalah memacu pertumbuhan di negara sendiri, pemerintah dapat menempatkan posisinya antara lain: (1) sebagai pelaksana kebijakan ekonomi; (2) sebagai konsumen, produsen sekaligus investor; (3) sebagai pengelola perusahaan (negara); dan (4) sebagai pengatur masyarakat (*regulator*). Sebagai pelaksana kebijaksanaan ekonomi, pemerintah secara aktif dapat melakukan perubahan dan pembenahan masalah-masalah keuangan, perdagangan, perindustrian dan sebagainya. Melalui lembaga-lembaga pasar, pemerintah secara aktif mempengaruhi apun perjalanan serta proses penawaran dan permintaan.

Namun demikian, pada saat aktivitas pembangunan masyarakat tidak dapat di lepaskan dari perkembangan internasional, tindakan-tindakan semacam itu tidak mudah dilakukan. Pemerintah semakin sukar mempertahankan diri pada posisi yang amat sentral dalam kegiatan pembangunan, terutama model perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang ada harus menoleh kepada kepentingan ekonomi dan politik negara-negara lain. Pemerintah tentu saja mampu mempengaruhi atau memaksakan kehendak serta melakukan pengawasan sehingga bangsa ini tetap dapat menentukan masa depannya sendiri. Tetapi proses mempengaruhi dan bentuk pengawasan tersebut, tidak dapat dilepaskan dari sistem yang diadopsi dan di canangkan oleh negara-negara lain (Semdi, 2012: 3).

Untuk memulihkan kondisi yang demikian, tentunya diperlukan upaya yang komperhensif dan efektif dalam program pembangunan yang bersifat simultan, yang mana didalamnya menghendaki adanya pemberdayaan masyarakat, baik selaku konsumen, angkatan kerja maupun pengusaha. Konsep pemberdayaan (*empowerment*), sebagaimana konsep *people centered development*, merupakan paradigma baru dalam masyarakat, dimana ada upaya untuk melibatkan urusan masyarakat sebesar mungkin dalam kegiatan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Keterlibatan unsur masyarakat secara lebih besar di sini maksudnya bukan hanya sekedar keterlibatan fisik, tetapi keterlibatan kepentingan seluruh masyarakat. Kecendrungan pelaksanaan paradigma pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat pada saat ini memiliki relevansi dengan tuntutan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pembangunan, karena masyarakat jenis apapun memiliki potensi mengembangkan diri dan pemberdayaan diri, selain itu juga terkait dengan perkembangan kemampuan masyarakat dan terbentuknya masyarakat madani (*civil society*). Walaupun hal ini bukan merupakan jaminan pasti bahwa dengan keterlibatan masyarakat madani dalam pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat yaitu terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat pasti dapat tercapai (Willem, 2012: 3).

Kemiskinan menurut Bappenas dalam (Asep Saefudin Dkk (2003: 4) adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai pada taraf yang manusiawi. Kemiskinan pada negara berkembang tidak hanya disebabkan oleh adanya pengangguran, banyak faktor yang memicu kemiskinan pada negara berkembang, antara lain : kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak

berdaya, potensi alam yang terbatas dan kualitas pendidikan dan kualitas kehidupan yang rendah. Umumnya faktor tersebut banyak dijumpai di pedesaan, desa atau pedesaan adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/ kota (Purnami,2014: 2).

Prioritas utama dalam kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok kurang beruntung, khususnya keluarga miskin, dimana dalam kesejahteraan sosial ini, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat (Purnami:2014: 4).

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya (Purnami, 2014: 5).

Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Desa Bunut Wetan, dengan mendirikan Pelatihan di desa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat urbanisasi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya di bidang perekonomian. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Desa Bunut Wetan adalah dengan pelatihan membatik. Tujuan yang diharapkan dengan pemberian program pelatihan ini adalah peningkatan kesejahteraan keluarga dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kehidupan sosial pada masyarakat desa Bunutwetan. Faktanya dalam pelaksanaan pelatihan tersebut pasti muncul beberapa hambatan salah satunya masih kurangnya partisipasi dari masyarakat, hal ini akan berpengaruh pada tujuan yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono, (2014: 9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan terkait masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, penelitian ini dilaksanakan di Jl. Raya Bunut Wetan, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Penelitian di Desa Bunut Wetan mampu memberikan data yang lengkap, mulai dari proses, hingga pertanggungjawaban terhadap subjek yang diteliti.

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari tempat atau sumber pertama atau objek penelitian dilakukan. Sumber data primer didapat melalui wawancara atau pengamatan hasil dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yaitu; Kepala Desa Bunut Wetan, KAUW Pemerintah Desa, Ketua PKK, dan Masyarakat yang mengikuti pelatihan membatik. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, atau data yang diterbitkan dan yang digunakan organisasi yang bukan pengelolanya.

Data sekunder berasal dari buku-buku, situs, internet, jurnal, dan artikel-artikel. Serta pengamatan atau observasi yang dilakukan penelitian secara langsung, antara lain mengamati Implementasi kebijakan pemberdayaan Masyarakat di Desa Bunut Wetan.

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, Sugiyono (2014:81). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian yaitu: *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sumber data dengan penimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang benar-benar dianggap paling tahu. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dilihat dari teknik pengumpulan data terdapat bermacam-macam teknik pengumpulan data. Ada tiga macam teknik pengumpulan data yaitu: observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan lain-lain.

Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:270) dapat dilakukan uji kredibilitas. Untuk menguji keabsahan data/tingkat kepercayaan data tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam hal ini, triangulasi diartikan sebagai proses pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai teknik. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Membatik

Implementasi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah aktivitas terencana dan juga dijalankan dengan serius yang mempunyai acuan pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan aktivitas. Implementasi sebagai penyedia sarana untuk menjalankan sesuatu yang mengakibatkan dampak terhadap sesuatu. Seperti yang telah disampaikan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2014: 139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pemerintah desa bunutwetan masih berusaha dalam pelatihan membatik dapat ditindaklanjuti bersama dengan pelatihan-pelatihan lain yang masih bersifat sesaat. Namun dalam hal pemberdayaan masyarakat dengan adanya pelatihan merupakan strategi pemberdayaan. Seperti yang telah dijelaskan Suharto (2014: 66) strategi pemberdayaan melalui tiga aras yakni aras mikro, aras mezzo, dan aras makro. Bentuk pelatihan merupakan tergolong aras mezzo yakni Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Pelaksanaan pelatihan merupakan salah satu cara memberdayakan masyarakat. Dengan kebijakan pemerintah desa untuk membuatkan wadah pelatihan menjadi sebuah harapan bagi

masyarakat. Sesuai dengan fokus penelitian bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan membatik, yaitu dilihat dari indikator pemberdayaan yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Akses

Dengan adanya akses dapat memudahkan pemerintah dalam menyelenggarakan segala urusan. Jika tidak adanya akses maka menjadi penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan dalam hal ini adalah fasilitas. Akses dapat berupa sumberdaya berupa waktu, tenaga, lahan, informasi, keterampilan dan sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Nugroho (2008: 78) bahwa akses adalah kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif dalam lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akses adalah segala sesuatu yang mampu memudahkan segala urusan dalam suatu penyelenggaraan.

Akses fasilitas yang digunakan dalam pelatihan membatik sudah disediakan oleh pemerintah desa yang bekerjasama dengan balai latihan kabupaten sehingga mempermudah masyarakat yang mengikuti pelatihan membatik dikarenakan tidak dipungut biaya apapun. Dari hasil observasi memang benar pelatihan membatik diselenggarakan balai latihan kabupaten dengan waktu satu bulan penuh di balai desa bunutwetan. Namun, dari pemerintah desa bunuwetan belum dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk tidak lanjut pelatihan membatik, dikarenakan pendanaan dalam pelatihan membatik membutuhkan dana yang besar.

2. Partisipasi

Partisipasi masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengindetifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, dan juga pemilihan dan pengambilan keputusan untuk alternatifnya solusi dalam menangani sebuah masalah. Seperti yang disampaikan oleh Nugroho (2008: 78) partisipasi merupakan keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk tercapainya suatu tujuan.

Keterlibatan masyarakat desa bunutwetan dalam pelatihan membatik sangat antusias. Bahkan dari desa lain ikut turut berpartisipasi. Pelatihan membatik yang dikhususkan kepada ibu-ibu yang berusia produktif dari 15-64 tahun. Rasa menambah wawasan dan ingin menjadi terampil dalam hal tentang batik membuat masyarakat terlibat dalam pelatihan membatik. Sehingga masyarakat khususnya ibu-ibu dari desa tersebut awal mula yang tidak menahu tentang batikpun menjadi terampil.

3. Kontrol

Dalam memberdayakan semua masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Dengan maksud, semua masyarakat dapat menikmati sumber daya yang ada. Dengan demikian, masyarakat kemudian menjadi sadar dan kritis, kemudian berperan sebagai pengontrol atas sesuatu yang terjadi dalam sebuah kegiatan. Seperti yang telah disampaikan oleh Nugroho (2008: 78) bahwa kontrol merupakan lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Dalam pelaksanaan pelatihan membatik dikhususkan kepada ibu-ibu desa bunutwetan. Ada sekitar 20-30 ibu-ibu yang turut serta dalam pelatihan membatik ini. Masyarakat dapat menikmati hasil dari kerja keras mereka dalam pembuatan batik. Sehingga masyarakatpun menjadi terampil dan berharap dapat membuka usaha dari pengalaman pelatihan membatik. Dari hasil observasi benar adanya pelatihan tersebut dikhususkan kepada ibu-ibu dan sekitar 20-30 orang. Namun, dalam

pelatihan tersebut banyak yang terlibat masyarakat khususnya ibu-ibu yang tergolong dalam komunitas PKK (pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga).

4. Manfaat

Manfaat pemberdayaan dalam pembangunan yang ada di masyarakat saat ini merupakan sebuah tatanan yang bisa dianggap paling mendekati dalam konteks pembangunan. Tetapi lelaki maupun perempuan berhak untuk menikmati atau merasakan hasil sumber daya. Mulai dari Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi masyarakat. Seperti yang disampaikan Nugroho (2008: 78) manfaat adalah laki-laki baik perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara keberhasilan.

Manfaat dari adanya pelatihan ini sangat dirasakan oleh masyarakat Bunut Wetan. Mulai dari pengalaman yang di dapatkan, menambah wawasan mereka tentang batik, dan juga dari yang tidak tau cara membatik menjadi sangat terampil.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Faktor pendukung merupakan yang mana semua hal yang mendukung atau yang mempermudah segala urusan. Sesuai dengan penyajian data sebelumnya dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, bahwa Beberapa fasilitas yang ada, dan juga sudah disiapkan oleh pemerintah yang dapat membantu masyarakat dalam memberdayakan masyarakat cukup baik, sehingga dapat memudahkan semua proses kinerja yang telah direncanakan.

Penghambat dalam pelaksanaan pelatihan membatik adalah segala sesuatu yang tidak ingin itu terjadi, karena jika dalam kinerja pemerintah ada satu faktor kendala, maka proses tersebut terhambat dalam pelaksanaannya.

Faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah belum ada wadah untuk pelatihan yang disediakan pemerintah desa dan juga masalah dana sehingga hal tersebut memicu ketidaklancaran proses kinerja aparatur, tetapi aparatur pemerintah desa masih berusaha untuk dapat menyelesaikannya. Berdasarkan hasil observasi memang pemerintah desa belum membuat kebijakan untuk pengadaan wadah untuk pelatihan membatik. Bahkan untuk pelatihan-pelatihan lain yang dilaksanakan belum ada tindak lanjut dikarenakan salahsatunya tidak ada wadah dan pendanaan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pelatihan Membatik di desa BunutWetan sudah berjalan cukup baik. Dapat dilihat dari indikator pemberdayaan yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaatnya. Pelaksanaan pelatihan membatik juga merupakan salah satu cara memberdayakan masyarakat. Dengan kebijakan Pemerintah desa untuk membuat wadah pelatihan menjadi sebuah harapan bagi masyarakat. Yang mana pelatihan dapat menambah wawasan, pengalaman dan keterampilan.
2. Faktor pendukung merupakan yang mana semua hal yang mendukung atau yang mempermudah segala urusan. Beberapa fasilitas yang ada, dan juga sudah disiapkan oleh pemerintah yang dapat membantu masyarakat dalam memberdayakan masyarakat cukup baik, sehingga dapat memudahkan semua proses kinerja yang telah direncanakan. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pelatihan membatik adalah belum ada wadah untuk pelatihan yang disediakan pemerintah desa dan juga masalah dana sehingga hal tersebut memicu ketidaklancaran proses kinerja aparatur, tetapi aparatur pemerintah desa masih berusaha untuk dapat menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Dimas, dkk. 2013. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan dasar Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya*. Vol 1 No5. administrasipublik.studentjurnal.ub.ac.id.
- Nugroho D, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Purnami, Ayu. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*. Vol 4 No 1. Jurnal.student.my.ac.id
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suharto, Edi. 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Jakarta: Refika Aditama.
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan masyarakat mungkinkah muncul antitensisnya* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Semdi, 2012. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Usman, Sunyato.2010. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa